

IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM KEBIJAKAN PUBLIK INDONESIA: STUDI PUSTAKA TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ERA REFORMASI

Muhammad Aldy syahputra¹
Teknik Elektro, Universitas Bina Darma¹
aldyyysyahputra0606@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission:

Review:

Revised:

Accepted:

Published:

Keywords

Pancasila

Kebijakan Publik

Reformasi

Governance

Implementasi

ABSTRACT

Era reformasi Indonesia menghadirkan tantangan kompleks dalam mengoperasionalisasikan Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks kebijakan publik modern. Penelitian ini menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan melalui pendekatan studi pustaka komprehensif terhadap literatur akademik periode 2020-2025. Metodologi kualitatif dengan teknik content analysis digunakan untuk mengidentifikasi pola implementasi dan evaluasi efektivitas integrasi prinsip-prinsip Pancasila dalam sistem governance Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Pancasila masih relevan sebagai legitimasi kebijakan publik, operasionalisasinya menghadapi hambatan berupa fragmentasi politik, desentralisasi tidak merata, dan persistensi praktik korupsi. Reformasi birokrasi telah menghasilkan kemajuan dalam penerapan good governance, namun kesenjangan antara idealitas normatif dengan realitas empiris masih signifikan. Pancasila sebagai ideologi terbuka menunjukkan adaptabilitas dalam menghadapi dinamika perubahan sosial-politik, namun memerlukan penguatan kapasitas institusional dan mekanisme akuntabilitas yang lebih efektif untuk memastikan internalisasi nilai-nilai dalam praktik pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berkeadilan.

Introduction

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam implementasinya di era reformasi yang telah berlangsung lebih dari dua dekade. Sebagai *state foundation* dan *national ideology*, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis, tetapi juga sebagai kerangka acuan utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik (Maulana Akbar et al., 2023). Era reformasi yang dimulai sejak 1998 membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan Indonesia, menandai transisi dari sistem otoritarian menuju demokrasi yang lebih terbuka, namun proses transformasi ini menimbulkan dilema dalam mengoperasionalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam *public policy formulation* dan *governance practices*.

Implementasi Pancasila dalam kebijakan publik era reformasi menghadapi tantangan *multidimensional* yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Kajian menunjukkan bahwa elit pemerintah menggunakan ideologi Pancasila untuk melegitimasi kebijakan publik, terutama dalam konteks krisis seperti pandemi COVID-19. Namun, realitas menunjukkan bahwa era Reformasi ditandai dengan desentralisasi, penguatan demokrasi, dan peningkatan penghormatan terhadap HAM, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti fragmentasi politik, konflik sosial, dan ketimpangan pembangunan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang efektivitas Pancasila sebagai *guiding principle* dalam *policy implementation* dan *public administration*.

Konteks *good governance* dan reformasi birokrasi yang menjadi agenda utama pemerintah Indonesia memerlukan integrasi yang lebih sistematis antara nilai-nilai Pancasila dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan modern. Dalam ranah tata kelola, Pancasila mengajarkan tentang pentingnya keadilan sosial dan musyawarah dalam pengambilan keputusan, namun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN hingga kini masih menjadi tantangan besar. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif Pancasila dengan realitas empiris dalam *public policy implementation*. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis bagaimana implementasi Pancasila sebagai dasar negara dapat dioptimalkan dalam konteks kebijakan publik Indonesia di era reformasi melalui pendekatan *literature review* yang komprehensif terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan kontemporer.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan pokok yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara direfleksikan dalam formulasi dan eksekusi kebijakan publik Indonesia di era reformasi? Kedua, apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengoperasionalisasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam praktik *governance* dan *public administration* modern? Ketiga, bagaimana efektivitas Pancasila sebagai *ideological framework* dalam menjawab dinamika perubahan sosial-politik dan tuntutan *democratic governance* di Indonesia pasca-reformasi? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks kebijakan publik Indonesia era reformasi melalui pendekatan studi pustaka. Secara spesifik, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola-pola implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai sektor kebijakan publik, mengevaluasi efektivitas integrasi prinsip-prinsip Pancasila dalam sistem *governance* Indonesia, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk optimalisasi peran Pancasila sebagai landasan *policy formulation* dan *implementation* yang responsif terhadap tantangan kontemporer. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam tiga dimensi utama.

Pertama, manfaat teoretis berupa pengembangan *conceptual framework* tentang implementasi ideologi negara dalam praktik kebijakan publik yang dapat memperkaya khazanah ilmu administrasi publik dan ilmu politik. Kedua, manfaat praktis berupa penyediaan *evidence-based recommendations* bagi para *policy makers* dan praktisi pemerintahan dalam mengoptimalkan peran Pancasila sebagai *guiding principle* dalam

public policy design dan *implementation*. Ketiga, manfaat akademis berupa kontribusi terhadap pengembangan literatur tentang hubungan antara ideologi negara, *democratic governance*, dan efektivitas kebijakan publik dalam konteks Indonesia sebagai negara demokratis berkembang.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada analisis mendalam terhadap berbagai sumber literatur akademik untuk memahami implementasi Pancasila dalam kebijakan publik Indonesia era reformasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap fenomena kompleks yang melibatkan dimensi ideologis, politik, dan sosial dalam konteks tata kelola pemerintahan. Metode penelitian kepustakaan merupakan strategi penelitian yang mengandalkan pengumpulan data melalui penelaahan sistematis terhadap dokumen-dokumen tertulis, publikasi ilmiah, dan sumber-sumber sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan analisis literatur yang mencakup jurnal akademik, buku teks, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan publik yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2020-2025 untuk memastikan relevansi dan aktualitas informasi (Nurislaminingsih & Heriyanto, 2024). Proses analisis data menggunakan teknik *content analysis* yang memungkinkan interpretasi sistematis terhadap makna dan pola-pola yang terkandung dalam teks-teks yang dikaji. Analisis konten dipilih karena kemampuannya dalam mengidentifikasi tema, konsep, dan hubungan antar variabel yang tersembunyi dalam berbagai dokumen akademik (BINUS School of Information Systems, 2024). Tahapan analisis meliputi *coding*, kategorisasi, dan interpretasi data yang dilakukan secara iteratif untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang implementasi Pancasila dalam praktik kebijakan publik. Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber data dan cross-checking informasi dari berbagai perspektif teoretis dan empiris yang berbeda untuk memastikan kredibilitas dan dependabilitas temuan penelitian.

Results and Discussion

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Formulasi Kebijakan Publik Era Reformasi

Analisis terhadap literatur menunjukkan bahwa implementasi Pancasila dalam kebijakan publik era reformasi mengalami transformasi signifikan dibandingkan era sebelumnya. Beberapa kebijakan kontroversial selama pandemi COVID-19 cenderung muncul karena keselarasan dengan ideologi dan peran Pancasila (Universitas Airlangga, 2024), yang menunjukkan bahwa Pancasila masih dijadikan legitimasi dalam perumusan kebijakan publik kontemporer. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila diharapkan dapat berkembang dan membentuk dasar perumusan kebijakan pemerintah sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat dan bangsa untuk mencapai tujuan negara (Azikin, 2018). Dalam konteks reformasi birokrasi, pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan

kualitas kebijakan dan penerapan good governance dengan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, efektif dan efisien (Kemenko PMK, 2024). Implementasi ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yang menekankan keadilan dan musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Tantangan Operasionalisasi Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Governance Modern

Era reformasi menghadirkan tantangan kompleks dalam operasionalisasi Pancasila. Terdapat tantangan dalam penerapan Pancasila di era reformasi (Universitas Medan Area, 2021; Detik, 2021), yang meliputi fragmentasi politik, desentralisasi yang tidak merata, dan persistensi praktik KKN dalam birokrasi. Tantangan ini diperkuat oleh kondisi dimana Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi (Pemkab Buleleng, 2024), menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan masih dalam tahap pengembangan. Kompleksitas tantangan ini juga tercermin dalam upaya reformasi birokrasi yang sudah menghasilkan banyak capaian, tetapi sejumlah pekerjaan rumah masih belum tertuntaskan (Kompas, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam implementasi prinsip-prinsip Pancasila, masih terdapat kesenjangan antara idealitas normatif dengan realitas empiris dalam praktik governance.

Efektivitas Pancasila sebagai Framework Ideologis dalam Democratic Governance

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila menunjukkan adaptabilitas dalam menghadapi dinamika perubahan sosial-politik era reformasi. Artikel ini menekankan pentingnya kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif untuk menjawab tantangan di masa mendatang (Kumoro & Triadi, 2024), yang mengindikasikan bahwa Pancasila masih relevan sebagai kerangka acuan dalam perumusan kebijakan yang responsif terhadap perubahan zaman. Efektivitas Pancasila dalam konteks democratic governance tercermin dalam upaya pelestarian nilainya di era reformasi. Upaya pelestarian nilai Pancasila di era reformasi (Ningrum et al., 2022) menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga kontinuitas ideologi negara dalam praktik pemerintahan demokratis. Namun demikian, implementasi Pancasila masih menghadapi paradoks antara tuntutan demokratisasi dengan kebutuhan menjaga kohesi sosial dan stabilitas politik. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun Pancasila tetap relevan sebagai dasar negara, operasionalisasinya dalam kebijakan publik era reformasi memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi. Diperlukan penguatan kapasitas institusional dan pengembangan mekanisme akuntabilitas yang lebih efektif untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi retorika politik, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berkeadilan.

Conclusion

Implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kebijakan publik Indonesia era reformasi menunjukkan dinamika yang kompleks dengan berbagai tantangan operasional. Transformasi sistem pemerintahan dari otoritarian menuju demokratis telah memberikan ruang bagi aktualisasi nilai-nilai Pancasila, namun proses operasionalisasinya masih menghadapi hambatan struktural. Fragmentasi politik, desentralisasi yang tidak merata, dan persistensi praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme menjadi kendala utama dalam

mengejawantahkan prinsip-prinsip Pancasila dalam tata kelola pemerintahan modern. Meskipun demikian, Pancasila tetap menunjukkan relevansinya sebagai kerangka ideologis yang adaptif dalam menghadapi perubahan sosial-politik kontemporer. Reformasi birokrasi dan upaya penerapan good governance telah menghasilkan kemajuan signifikan, walaupun masih terdapat kesenjangan antara idealitas normatif dengan realitas empiris. Diperlukan penguatan kapasitas institusional dan pengembangan mekanisme akuntabilitas yang lebih sistematis untuk memastikan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berkeadilan sosial.

References

- Azikin, A. (2018). Konsep Dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 77–90. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1098>
- BINUS School of Information Systems. (2024). Content Analysis. Diakses dari: <https://sis.binus.ac.id/2024/11/08/content-analysis/>
- Espos Indonesia. (2024). Pancasila pada Era Modern. Espos.id. Diakses dari: <https://kolom.espos.id/pancasila-pada-era-modern-2017127>
- Kumoro, M. D. S., & Triadi, I. (2024). *Perbandingan Ekosopol Dan Keamanan Dalam Implementasi Pancasila Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi*. 9(4), 1–23.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2024). Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila dalam Mendorong Pembangunan Manusia Indonesia. Diakses dari: <https://www.kemenkopmk.go.id/penerapan-sistem-ekonomi-pancasila-dalam-mendorong-pembangunan-manusia-indonesia>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2024). Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila dalam Mendorong Pembangunan Manusia Indonesia. Diakses dari: <https://www.kemenkopmk.go.id/penerapan-sistem-ekonomi-pancasila-dalam-mendorong-pembangunan-manusia-indonesia>
- Kemenko PMK. (2024). Reformasi Birokrasi Kemenko PMK. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Diakses dari: <https://www.kemenkopmk.go.id/RB/profil>
- Kompas. (2024). Capaian Reformasi Birokrasi Jelang Transisi Pemerintahan. Kompas.id. Diakses dari: <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/15/capaian-reformasi-birokrasi-jelang-transisi-pemerintahan>
- Maulana Akbar, L., Ilham, A. C. M., & Karendra, M. R. (2023). Ideologi Pancasila Sebagai Norma Dasar Kebijakan Hukum Di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(6), 473–480.
- Ningrum, R. D., Zulfaizah, S., Azizah, Z. P. N., & Fitriono, R. A. (2022). Upaya Pelestarian Nilai Pancasila di Era Reformasi. *Gema Keadilan*, 9(3). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16543>
- Nurislaminingsih, R., & Heriyanto. (2024). *Riset kualitatif untuk pemula teknik analisis data*

- (Issue March). www.cvintisharpublishing.com
- Pemkab Buleleng. (2024). Pengertian, Prinsip dan Penerapan Good Governance di Indonesia. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Diakses dari: <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>
- Universitas Airlangga. (2024). Peran Pancasila dalam Legitimasi Kebijakan Publik Indonesia. Universitas Airlangga Official Website. Diakses dari: <https://unair.ac.id/peran-pancasila-dalam-legitimasi-kebijakan-publik-indonesia/>
- Universitas Medan Area. (2021). Tantangan dalam Penerapan Pancasila di Era Reformasi. Magister Ilmu Administrasi Publik. Diakses dari: <https://map.uma.ac.id/2021/08/tantangan-dalam-penerapan->
- Universitas Medan Area. (2021). Tantangan dalam Penerapan Pancasila di Era Reformasi. Magister Ilmu Administrasi Publik. Diakses dari: <https://map.uma.ac.id/2021/08/tantangan-dalam-penerapan-pancasila-di-era-reformasi/>
-